

# **REKONSTRUKSI REGULASI KEBIJAKAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TAHAP PENYIDIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

## **ABSTRAK**

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh dan terhadap anak makin menarik, mengingat usia anak yang terlibat dalam kasus tersebut makin berusia muda khususnya anak sebagai pelaku. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuka peluang adanya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Namun dalam prakteknya masih banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pidana secara umum. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Tujuan utama dari penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama adalah mengkaji pelaksanaan penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum ditahapan penyidikan saat ini, kedua mengkaji kelemahan-kelemahan pelaksanaan penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum ditahapan penyidikan, dan ketiga merekonstruksi regulasi kebijakan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum ditahapan penyidikan yang berbasis nilai keadilan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori keadilan Aristoteles, John Rawls dan Islam, teori kebijakan kriminal, teori kriminologi dan teori hukum progresif.

Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sifatnya yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian adalah Anak, petugas Balai Pemasarakatan Purwokerto, Petugas Kepolisian (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen), sedangkan objek penelitian adalah dokumen diversi. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka, sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif.

Rekonstruksi regulasi diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan berbasis keadilan adalah untuk mewujudkan pelaksanaan diversi agar memenuhi sesuai nilai keadilan serta mengedepankan perlindungan kepentingan anak. Adapun pasal yang direkonstruksi adalah Pasal 5 ayat

mengenai kewajiban pelaksanaan diversi, Pasal 7 ayat (1) tentang kewajiban melaksanakan diversi dan Pasal 8 ayat (3) mengenai kepentingan anak yang harus dikedepankan. Rekonstruksi regulasi ini diharapkan menjadi perbaikan bagi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara substansial akan lebih mencerminkan nilai keadilan.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Regulasi, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Nilai Keadilan.

# **THE RECONSTRUCTION REGULATION OF THE DIVERSION FOR YOUNG OFFENDER ON STAGE INVESTIGATION FROM JUVENILE JUSTICE SYSTEM BASED ON JUSTICE**

## **ABSTRACT**

Follow-up cases by and against children are increasingly interesting, given the age of the children involved in this case further aggravates the children. Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system opens opportunities to resolve the problems of children in conflict with the law through diversion. But in practice, there are still many cases of children in conflict with the law (ABH), which are resolved using public consent. Child protection activities. The first aspect, related to policies and legislation in force concerning child protection. The second aspect, the applicable laws and regulations.

The main purpose of this study includes three things. The first is reviewing the resolution of cases of children in conflict with the current law, the second examines the weaknesses of the agreement on the resolution of the problems of children in conflict with the law, and reconstruction regulation of the diversion for young offender on stage investigation from juvenile justice system based on justice link that contains a lot of funds. and Islam, criminal policy theory, and progressive legal theory.

Research is a type of qualitative research by analytical descriptive nature. The method used is a method that discusses empirical juridical. The subjects of the study were Children, Purwokerto Penitentiary Officers, Police Officers (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara and Kebumen), while the research object was a diversion document. Data were collected by interview techniques and literature study, while data analysis was done by inductive qualitative analysis methods.

Reconstruction of the problem of children in conflict with the basic law of justice is to make a diversion agreement to meet the value of justice and prioritize the agreement of the interests of children. Article 5 paragraph (3) concerning the obligation to implement diversion and Article 8 paragraph (3) concerning the interests of children that must be prioritized. The reconstruction of this regulation must be improved for the Children's Criminal Justice System Act which is more substantial will better reflect the value of justice.

**Keywords:** Reconstruction, Regulation, Children in Conflict with Law, Justice.